



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDARTO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR**
3. NHHK : **212742**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 741.979.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/65 m² di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 230.115.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/100 m² di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 184.864.000
4. Tanah Seluas 171 m² di KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA
Rp. 82.000.000
5. Tanah Seluas 1190 m² di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 241.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000
3. MOTOR, HONDA X1B02N04LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.500.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 15.500.000



5. MOTOR, HONDA ASTREA STAR/ C86 CUB Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.626.514
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.034.105.514
III. HUTANG	Rp.	68.930.080
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	965.175.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.